



Volume 25 No 1, Januari 2023

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah

Abdul Rahman¹, Darus Altin²

STIE Pertiba, Bangka Belitung, Indonesia¹

email: ahman0307@gmail.com

Universitas Bangka Belitung, Indonesia²

korespondensi altin@ubb.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of regional income (PAD, transfer funds, and other legal regional income) on regional financial performance and regional financial independence. This research uses the type of research with the Literature Review method, taking 30 articles from nationally accredited journals through Google Scholar. The results of the study concluded that PAD simultaneously has a positive and significant effect on regional financial performance and on regional financial independence, but partially its effect on regional financial performance and financial independence is influenced by the elements studied. Transfer funds simultaneously have a significant negative effect on financial performance and on regional financial independence, as well as partially the effect on financial performance and regional financial independence is influenced by the elements studied. There are no researchers who make Other Legitimate Regional Revenues as research variables in the selected articles, so the effect on financial performance and on regional financial independence cannot be concluded.

Keywords: *regional income, regional financial performance, regional financial independence*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah (PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) terhadap kinerja keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Literatur Reviu, mengambil 30 artikel dari jurnal terakreditasi nasional melalui *Google Scholar*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah maupun terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara parsial pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh elemen yang diteliti. Dana transfer secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah, demikian juga secara parsial pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh elemen yang diteliti. Tidak adanya peneliti yang menjadikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel penelitian pada artikel yang dipilih maka pengaruhnya terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah tidak dapat disimpulkan.

Kata kunci: *pendapatan daerah; kinerja keuangan daerah; kemandirian keuangan daerah*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah serta membandingkan kesesuaian antara tujuan dan implementasinya. Akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pentingnya akuntabilitas publik bagi setiap pemerintah daerah setidaknya harus didukung dengan kinerja keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan APBD. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Mardiasmo, 2004).

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah

maupun tingkat kemandirian daerah. Pendapatan daerah diartikan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penelitian terkait pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian literatur (*literature research*). Penelitian pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan daerah maupun terhadap kemandirian keuangan daerah yang dilakukan peneliti beragam, beberapa peneliti melakukan penelitian terhadap elemen pendapatan daerah secara umum seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Namun, beberapa peneliti juga melakukan penelitian secara spesifik terhadap elemen pendapatan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil, Dana Hibah dan elemen spesifik pendapatan daerah lainnya.

Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan, antara lain: Puspita Ayu, P. (2018), Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018), Saraswati & Rioni. (2019), Putri dan Darmayanti. (2019), Maulina, F., & Rhea, R. (2019), Verawaty dkk. (2020), Fatmawati, T. O., & Sapari, S. (2020), Pasaribu, S. H. (2020), Wahyudin, I. (2020), Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021), dan Heryanti, dkk. (2021). Diantara penelitian tersebut, Heryanti (2021: 2), menyimpulkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dan Dana

Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan Dana Perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Puspita Ayu (2018:80), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berarti H1 diterima. Artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berarti H2 diterima. Artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan diungkapkan oleh Verawaty dkk (2020:21), bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat pengaruh negatif DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian terhadap kemandirian daerah, antara lain dilakukan oleh: Balqis dkk. (2018), R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018), Aryadhani Prasetyo & Dewi Rahayu. (2019), Ginting dkk.

(2019), Wahyuni & Ardini.(2019), Amalia & Haryanto, (2019), Musfirati dan Sugiyanto. (2019), Maya dan Lita. (2019), Malau & Prapat. (2020), Machfud, dkk. (2020), Handayani & Erinos, (2020), Oki dkk. (2020), Saleh. (2020), Lukitawati, (2020), Kristina dkk. (2021), Saraswati. (2021), Marzuki M. dkk. (2022), Sinta Bella dkk. (2022), dan Rivandi & Anggraini. (2022).

Kesimpulan penelitian terhadap kemandirian keuangan daerah diantaranya hasil penelitian Saraswati dan Nurhajanti (2021:21) menyebutkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap keamandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Marzuki dkk (2022:90), menyatakan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi. Sementara itu dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya jika kinerja pajak daerah dan dana bagi hasil tinggi maka kemandirian keuangan daerah juga tinggi, sedangkan semakin tinggi kinerja dana alokasi khusus maka kemandirian keuangan daerah akan semakin menurun.

Selanjutnya, literatur revidi ini dilakukan dengan mengutip artikel yang terkait dengan pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah dari 30 artikel di berbagai jurnal

terakreditasi nasional yang terbit 2018-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah (PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) terhadap kinerja keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Tema ini perlu dilakukan penelitian, sebab Penulis belum menemukan artikel penelitian-penelitian terdahulu khususnya rentang waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 yang melakukan kajian dengan menggunakan 2 variabel dependen sekaligus, yakni kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Daerah

Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat, terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dan Dana transfer antar daerah, yakni Dana Bagi Hasil antar daerah, dan Bantuan Keuangan; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendapatan daerah

menjadi variabel independen (X) yang dibagi menjadi variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah), X_2 (Pendapatan Transfer), dan X_3 (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)

1. Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2017: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dalam suatu unit organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho dan Rohman, 2012).

Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dan data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran kemampuan pemerintahan daerah berdasarkan kinerja dimasa lalu dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menjadi variabel dependen 1 (Y_1).

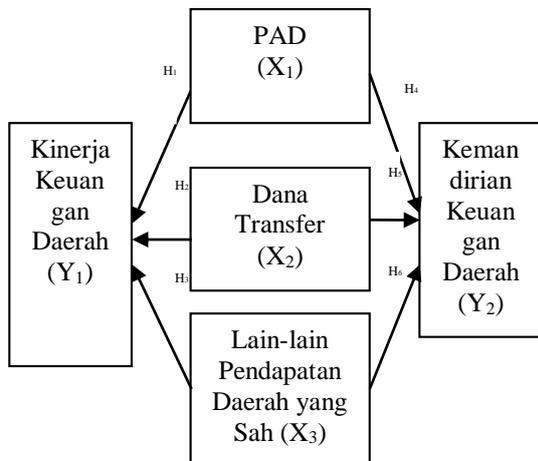
Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2017). Selain itu menunjukkan besarnya ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menjadi variabel dependen 2 (Y_2).

Kerangka Pemikiran & Hipotesis

Kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap kinerja keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar 1 di atas, hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
- H₂: Dana Transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
- H₃: Lain-lain Pendapatan Daerah yang

- Sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- H₄: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
- H₅: Dana Transfer berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
- H₆: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Literature Reviu. Literature reviu merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019).

Identifikasi dan pemilihan literatur pada penelitian ini dilakukan dengan identifikasi masalah, pencarian literatur, pemilihan hasil pencarian literatur dan analisa hasil pencarian literatur yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan kemandirian keuangan yang mempengaruhinya pada beberapa jurnal melalui *Google Scholar* berdasarkan judul, abstrak, atau keyword yang meliputi kinerja keuangan daerah dan kemandirian keuangan. Dan dikumpulkan 30 artikel dari berbagai jurnal berstandar nasional terbitan 2018-2022. Adapun tahap pencarian dan pemilihan literatur dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Indentifikasi masalah yakni pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah;
- b. Pencarian literatur melalui *Google Scholar* dengan menggunakan keyword “Kinerja Keuangan Daerah” dan “Kemandirian Keuangan Daerah.”

- c. Pemilihan hasil pencarian literatur dibatasi artikel yang terbit sejak 2018. Hasil pencarian dengan keyword “Kinerja Keuangan Daerah” teridentifikasi artikel sebanyak 94.400 artikel dan dengan keyword “Kemandirian Keuangan Daerah” teridentifikasi 21.700 artikel dari berbagai jurnal. Kemudian dilakukan seleksi dengan topik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, baik secara umum maupun secara khusus membahas elemen-elemen pendapatan daerah. Dan disimpulkan 30 artikel yang berstandar nasional baik dengan keyword “kinerja keuangan” maupun dengan keyword “kemandirian keuangan.”
- d. membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap 30 artikel dari berbagai jurnal terakreditasi nasional yang dipilih, kemudian dirangkum dalam tinjauan literatur sistematis sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 1

Hasil Systematic Literature Review

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|----|--|--|
| 1. | Puspita_Ayu, P. (2018). | PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Barat. |
| 2. | Balqis dkk. (2018) | Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan retribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah |
| 3. | Anggreni, N. K. A., Artini, S., & Gede, L. (2019). | PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan |

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|----|--|---|
| | | daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan kabupaten badung menurun. Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah kabupaten Badung menurun. |
| 4. | R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid, 2018 | PAD, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. |
| 5. | Aryadhani Prasetyo & Dewi Rahayu, 2019 | PAD, DAU, DBH, dan Fiscal Stress berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian secara simultan; PAD dan DBH berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian; DAU dan Fiscal Stress berpengaruh tidak nyata terhadap terhadap Tingkat Kemandirian; dan PAD merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian. |
| 6. | Ginting dkk. 2019 | Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3 persen kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV |
| 7. | Wahyuni & Ardini. 2019 | PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. |
| 8. | Amalia & Haryanto, 2019 | PAD pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, DAU memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. |

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|-----|---------------------------------|---|
| 9. | Saraswati & Rioni. 2019 | Variabel PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. |
| 10. | Putri dan Darmayanti, 2019 | PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. |
| 11. | Maulina, F., & Rhea, R. (2019). | Pola hubungan tingkat kemandirian daerah untuk tahun anggaran 2013-2017 secara umum berada pada kriteria Partisipatif. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kategori Cukup. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Efektifitas termasuk dalam kategori Efektif. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Efisiensi termasuk dalam kategori Kurang Efisien. Hasil perhitungan Rasio Kesenjangan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan belum adanya keseimbangan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung |
| 12. | Musfirati dan Sugiyanto, 2019 | DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. |
| 13. | Maya dan Lita, 2019 | Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. |

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|-----|--------------------------|---|
| 14. | Malau & Prapat. 2020 | PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah |
| 15. | Machfud, dkk. 2020 | PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. |
| 16. | Handayani & Erinos, 2020 | PAD secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah tidak diengaruhi oleh belanja modal. Variabel moderasi yaitu peertumbuhan ekonomi yang tujuannya memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, tidak dapat mempengaruhi dijadikan sebagai variabel moderasi hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari yang ditetapkan |
| 17. | Oki dkk. 2020 | Rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. |
| 18. | Saleh, 2020 | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, baik jumlahnya tinggi maupun jumlahnya rendah, memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor |
| 19. | Lukitawati, 2020 | Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah |
| 20. | Verawaty dkk. 2020 | PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat pengaruh negatif DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|-----|--|---|
| | | Adapun DBH tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. |
| 21. | Fatmawati, T. O., & Sapari, S. (2020). | PAD dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur |
| 22. | Pasaribu, S. H. (2020). | PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat |
| 23. | Wahyudin, I. (2020). | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 24. | Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W., 2021 | Terdapat pengaruh yang signifikan dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi dana perimbangan memiliki pengaruh dan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengeluaran daerah tidak berpengaruh dan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. |
| 25. | Kristina, dkk. 2021 | PAD mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, sementara untuk Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Dan secara bersamaan PAD dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah |
| 26. | Saraswati. 2021 | Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak |

| No | Penulis dan Tahun | Hasil |
|-----|---------------------------|---|
| | | memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah |
| 27. | Heryanti, dkk. 2021 | PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. |
| 28. | Marzuki M, dkk, 2022 | Pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi. Sementara itu dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah |
| 29. | Sinta Bella dkk, 2022 | PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. DAU secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Variabel belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Variabel PAD, DAU dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah |
| 30. | Rivandi & Anggraini. 2022 | Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemandirian keuangan daerah |

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Ayu, P. (2018), Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018), Saraswati & Rioni. (2019), Verawaty dkk. (2020), Fatmawati, T. O., & Sapari, S. (2020), Pasaribu, S. H. (2020), Wahyudin, I. (2020), dan Heryanti, dkk. (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal berbeda dikemukakan pada penelitian Putri dan Darmayanti (2019), bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah hipotesis (H₁) diterima.

Terhadap kinerja dana perimbangan yang mempengaruhi kinerja keuangan Anggreni, N. K. A., Artini, S., & Gede, L. (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan daerah menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019), Heryanti, dkk (2021), menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Wahyudin, I. (2020), bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Fatmawati, T. O., & Sapari, S. (2020), menyimpulkan penelitiannya bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi umum

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa dana transfer secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis (H₂) diterima.

Pengaruh pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, penelitian yang dilakukan oleh Balqis dkk. (2018), Maya dan Lita. (2019), Lukitawati. (2020), Saraswati. (2021), dan Marzuki M. dkk. (2022) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Semua peneliti seperti Balqis dkk. (2018), R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018), Aryadhani Prasetyo & Dewi Rahayu. (2019), Ginting dkk. (2019), Wahyuni & Ardini.(2019), Amalia & Haryanto, (2019), Musfirati dan Sugiyanto. (2019), Maya dan Lita. (2019), Malau & Prapat. (2020), Machfud, dkk. (2020), Handayani & Erinos, (2020), Oki dkk. (2020), Saleh. (2020), Lukitawati, (2020), Kristina dkk. (2021), Saraswati. (2021), Marzuki M. dkk. (2022), Sinta Bella dkk. (2022), dan Rivandi & Anggraini. (2022), menyimpulkan hal yang sama bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan (nyata) terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Maka, hipotesis (H₄) diterima

Terhadap dana perimbangan, penelitian Balqis dkk. (2018), R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018), Ginting dkk. (2019), dan Saleh. (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, kesimpulan berbeda disampaikan oleh peneliti Kristina dkk. (2021), dan

Saraswati. (2021) bahwa dana perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Beberapa peneliti melakukan penelitian secara khusus pada elemen dana transfer yakni DAU, DBH, dan DAK, seperti yang dilakukan oleh Balqis dkk. (2018), Aryadhani Prasetyo & Dewi Rahayu. (2019), Amalia & Haryanto, (2019), Musfirati dan Sugiyanto. (2019), dan Marzuki M. dkk. (2022), mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, hasil penelitian berbeda dengan variabel yang sama diungkapkan oleh Maya dan Lita. (2019) bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, secara simultan dana transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, hipotesis (H₅) diterima.

Terhadap hipotesis (H₃) dan hipotesis (H₆) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah, dari 30 artikel yang dijadikan literatur revidi tidak satupun yang menjadikan variabel ini sebagai variabel penelitian, sehingga tidak dapat disimpulkan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah maupun terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara parsial pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh elemen yang diteliti. Dana transfer secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah, demikian

juga secara parsial pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh elemen yang diteliti. Tidak adanya peneliti yang menjadikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel penelitian pada artikel yang dipilih maka pengaruhnya terhadap kinerja keuangan maupun terhadap kemandirian keuangan daerah tidak dapat disimpulkan.

Keterbatasan penelitian ini hanya berdasarkan kajian literatur yang tidak sistematis, sehingga harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan dalam terutama untuk tujuan generalisasi. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan penelitian lapangan oleh peneliti selanjutnya untuk mendapatkan gambaran dan hasil yang lebih berkualitas. Serta perlu mengambil variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran pengaruh variabel tersebut terhadap kinerja keuangan maupun kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39.
- Anggreni, N. K. A., Artini, S., & Gede, L. (2019). *Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Balqis, M., Murdiati, S., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (Dppkad) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(2).
- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5), 675-683.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*, 11(1), 10-19.
- Fayziah Amalia N, A., & Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Daa Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provisni Jawa Tengah 2012-201. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.
- Halim, Abdul. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Lukitawati, L. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2).
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Malau, E., & Parapat, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 3(2), 332-337.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, M., Akhyar, C., Nurlela, N., & Yandani, F. (2022). Pengaruh

- Penerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 11(1).
- Maulina, F., & Rhea, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11-22.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174-186.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1-6.
- Pasaribu, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 191-201.
- Prasetyo, A., & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 872-881.
- Puspita_Ayu, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80-96.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834-2861.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831-6842.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111-134.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021, August). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 51-64).
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20-36.
- Verawaty, V., Jaya, A., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di

- Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21–37.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86-97.